

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa BPBD Kota Semarang telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam penanggulangan banjir dan banjir rob melalui tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010. Pada tahap prabencana, BPBD melakukan mitigasi melalui pembuatan peta risiko, sosialisasi, dan pengembangan sistem peringatan dini. Pada tahap tanggap darurat, BPBD melakukan evakuasi, pendirian posko, distribusi logistik, dan koordinasi lintas sektor. Sementara pada tahap pascabencana, BPBD melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemulihan infrastruktur dan layanan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masing-masing kecamatan memiliki tingkat efektivitas yang berbeda dan banyak keterbatasan dalam hal koordinasi dan sumber daya.

Penelitian ini menemukan berdasarkan rumusan masalah kedua bahwa hal-hal berikut mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD: regulasi yang jelas, dukungan pemerintah daerah, sistem peringatan dini, kerja sama lintas sektor, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, ada beberapa hambatan yang masih ada. Ini termasuk jumlah personel yang terbatas, anggaran yang terbatas, kekurangan sarana dan prasarana, dan koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya, untuk memperbaiki penanggulangan banjir dan banjir rob di Kota

Semarang, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola kebencanaan untuk menjadi lebih berkolaborasi, adaptif, dan berkelanjutan.

4.2 Refleksi Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam menangani bencana banjir dan banjir rob tidak hanya bergantung pada kemampuan organisasi dalam merespons bencana, tetapi juga pada kemampuan untuk membangun sistem tata kelola kebencanaan yang bekerja sama dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah berhasil mengembangkan berbagai program untuk mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, membentuk Kelompok Siaga Bencana, Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan bekerja sama lintas sektor dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan. Hasil ini menunjukkan komitmen kelembagaan yang kuat untuk membangun tata kelola kebencanaan yang terintegrasi, responsif, dan partisipatif. Peneliti berpendapat bahwa program-program tersebut telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan meningkatkan ketahanan sosial di daerah yang memiliki tingkat kerawanan banjir dan rob yang tinggi. Oleh karena itu, elemen kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi pilar penting dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Semarang.

Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kapasitas operasional yang memadai belum sepenuhnya diperlukan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang optimal dalam tata kelola kebencanaan. Efektivitas penanganan bencana di

lapangan masih dipengaruhi oleh keterbatasan armada, logistik, sumber daya manusia, dan ketersediaan teknologi pendukung seperti Sistem Peringatan Dini yang belum tersedia secara menyeluruh. Peneliti menemukan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan kelembagaan dan kebutuhan operasional yang terus meningkat seiring kompleksitas ancaman banjir dan banjir rob di Kota Semarang. Akibatnya, kebijakan yang lebih berfokus pada meningkatkan kapasitas teknis melalui peningkatan dukungan anggaran, modernisasi sarana dan prasarana kebencanaan, dan pemerataan sumber daya berdasarkan tingkat risiko wilayah. Refleksi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada koordinasi dan partisipasi masyarakat, tetapi juga memerlukan dukungan operasional yang memadai. Hal ini diperlukan agar prinsip keadilan, efektifitas, dan efisiensi dalam tata kelola kebencanaan dapat diterapkan secara optimal.

4.3 Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi banjir rob dan bencana banjir di seluruh wilayah yang rentan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang harus meningkatkan kapasitas operasionalnya. Penguatan ini dapat dicapai dengan menambah armada operasional, memperbarui kendaraan yang sudah tua, dan meningkatkan ketersediaan peralatan kebencanaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang terkena dampak. Selain itu, BPBD harus mendorong penyediaan teknologi kebencanaan, terutama Sistem Peringatan Dini, secara merata di seluruh kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi. Secara merata tersedianya sistem peringatan dini akan meningkatkan kemampuan

untuk mendeteksi risiko dan mempercepat proses pengambilan keputusan sebelum bencana terjadi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas operasional meningkatkan respons darurat dan memperkuat sistem mitigasi bencana berbasis teknologi yang berfokus pada pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.

BPBD Kota Semarang harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kebencanaan yang berkelanjutan selain penguatan sarana dan prasarana. Mengingat betapa sulitnya menangani banjir dan banjir rob, pengembangan kompetensi personel sangat penting. Ini memerlukan kemampuan teknis, manajerial, dan koordinasi lintas sektor. Sebaliknya, perlu terus memperluas program Kelompok Siaga Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana, simulasi kebencanaan, dan pendidikan mitigasi di sekolah dan kelurahan. Upaya ini akan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan pemerintah saat tanggap darurat. Sistem penanggulangan bencana Kota Semarang dapat berjalan lebih efisien, berpartisipasi, dan adaptif terhadap berbagai ancaman bencana yang terus berkembang jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Pemerintah kota Semarang harus meningkatkan dukungan pendanaan dan memperkuat tata kelola kebencanaan melalui koordinasi lintas sektor yang lebih terintegrasi. Anggaran untuk kebencanaan sebaiknya dialokasikan sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah sehingga dapat memenuhi kebutuhan logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi setelah bencana. Selain itu, untuk memastikan

keberlanjutan program pengurangan risiko bencana, diperlukan penguatan kerja sama antara BPBD dengan perangkat daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, dan pemerintah pusat. Agar bantuan dapat diberikan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan proporsional sesuai kebutuhan lapangan, sistem distribusi logistik harus dikembangkan berbasis data risiko. Diharapkan tata kelola penanggulangan bencana Kota Semarang dapat meningkatkan ketahanan wilayah serta meningkatkan pelayanan publik di bidang kebencanaan dengan meningkatkan aspek pendanaan, koordinasi, dan akuntabilitas kelembagaan.